

PEMBUATAN PETA KELURAHAN RAJABASA NUNYAI, KECAMATAN RAJABASA, KOTA BANDAR LAMPUNG

Alimuddin^{1*}, Syamsurijal Rasimeng¹, RZ Sinambela¹

Jurusan Teknik Geofisika Universitas Lampung, Bandar Lampung

Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145

Penulis Korespondensi : alimuddin72@eng.unila.ac.id

Abstrak

Pemekaran wilayah administrasi untuk mendukung otonomi daerah adalah sebuah hal yang lazim dilakukan, seperti halnya yang terjadi dengan Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Pemekaran ini tentunya mengandung tantangan dan peluang untuk membangun wilayah baru tersebut secara optimal. Berdasarkan kebutuhan dalam menjawab peluang dan tantangan tersebut, penegasan batas wilayah jelas menjadi semakin penting seiring dengan pesatnya pengembangan wilayah dan pertumbuhan investasi. Pembuatan Peta Kelurahan dengan batas wilayah indikatif merupakan awal dari pengembangan potensi dan penataan wilayah desa. Data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah data citra resolusi tinggi dan Peta RBI, dimana kegiatan pengabdian ini menghasilkan kajian awal penegasan batas kelurahan melalui proses perbandingan antara data peta RBI dengan hasil verifikasi yang disajikan dalam peta citra. Hal ini juga memberikan kontribusi penting dalam rangka mendorong terlaksananya otonomi desa seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Kegiatan pengabdian ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan aparat kelurahan dan masyarakat tentang pentingnya penegasan batas wilayah pada Peta Kelurahan Rajabasa Nunyai, serta penyebaran Teknologi informasi terkait kepada semua stakeholder dan masyarakat sekitar. Dengan ketersediaan Peta Kelurahan dan interaksi yang terjalin, diharapkan masyarakat dapat lebih peka dalam memanfaatkan potensi daerah yang dimilikinya.

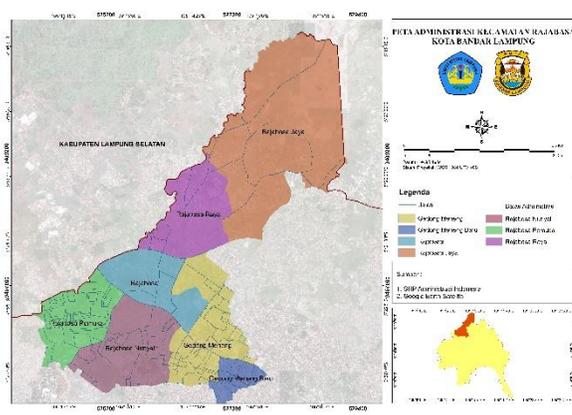
Kata kunci: Batas wilayah, peta citra, Kelurahan Rajabasa Nunyai, pemekaran

1. Pendahuluan

Pemberdayaan potensi daerah pada suatu wilayah sejatinya diawali dari Desa atau Kelurahan. Peran Desa/Kelurahan semakin kuat dengan dukungan anggaran yang langsung bersumber dari APBN melalui dana desa sesuai dengan amanat Undang-Undang yang dituangkan dalam beberapa Peraturan Pemerintah.

Dalam proses meningkatkan perkembangan suatu daerah, pemekaran wilayah desa/kelurahan menjadi sebuah hal yang sangat lazim terjadi. Seperti halnya dengan Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Karena perkembangan yang demikian pesat maka terjadi pemekaran dan pemecahan wilayah administrasi yang sebelumnya berada dalam wilayah Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, wilayah Kecamatan

Rajabasa dibagi menjadi 7 (tujuh) kelurahan, yaitu: (1) Kelurahan Rajabasa; (2) Kelurahan Rajabasa Nunyai; (3) Kelurahan Rajabasa Pemuka; (4) Kelurahan Gedong Meneng; (5) Kelurahan Gedong Meneng Baru; (6) Kelurahan Rajabasa Raya; dan (7) Kelurahan Rajabasa Jaya (BPS, 2019).



Gambar 1. Peta Administratif Kecamatan Rajabasa

Pemekaran ini tentunya mengandung permasalahan dan tantangan untuk membangun wilayah baru tersebut secara optimal, yang salah satunya adalah tentang penegasan perubahan batas wilayah kelurahan. Berdasarkan aspek spasial kewilayahan, masih banyak wilayah desa yang belum mempunyai garis batas yang tegas dan mempunyai peta desa yang dibuat sesuai dengan kaidah-kaidah pemetaan. Kondisi ini tentu akan berakibat kepada belum jelasnya luas wilayah desa, dimana luasan wilayah desa yang bersifat definitif dan berketetapan hukum menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam pengalokasian dana desa yang bersumber dari APBN. Disini terlihat bahwa luas wilayah dan tegasnya garis batas wilayah menjadi hal penting untuk segera diselesaikan.

Secara khusus, peta wilayah desa yang terpampang di kantor Kelurahan Rajabasa Nunyai terlihat belum dibuat berdasarkan kaidah-kaidah pemetaan yang baik. Peta tersebut masih sebatas menggambarkan bentuk umum wilayah administrasi dari desa tersebut dan belum menampilkan luas wilayah secara tepat.

Kebutuhan akan penegasan peta administratif yang bersifat definitif jelas menjadi semakin penting seiring dengan pesatnya pengembangan wilayah dan pertumbuhan investasi. Peta administrasi dan orientasi desa merupakan awal dari pengembangan potensi dan penataan wilayah desa memberikan kontribusi penting dalam rangka mendorong terlaksananya otonomi desa seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Penataan batas wilayah desa juga merupakan salah satu upaya penting yang dapat dilakukan dalam rangka pengendalian dini terhadap konflik antar wilayah (desa) yang terkait dengan masalah klaim batas wilayah, sengketa lahan antar masyarakat dan pengelolaan aset sumber daya alam di wilayah perbatasan antar desa.

Proses penetapan segmen garis batas dapat dilakukan dengan menggunakan metode kartometrik dengan mengacu pada Permendagri No. 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Metode kartometrik merupakan penelusuran atau penarikan garis batas pada peta kerja ataupun peta dasar dan pengukuran atau penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap (Kementerian Dalam Negeri, 2012).

Pembuatan peta batas wilayah ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menghindari masalah konflik batas dan sebagai sarana optimalisasi pembangunan di wilayah Rajabasa Nunyai. Peta yang dihasilkan dalam kegiatan pengabdian ini masih menggunakan batas wilayah kelurahan indikatif. Peta Kelurahan masih dapat diperbaiki atau direvisi untuk unsur batas wilayah indikatif menjadi batas wilayah definitif setelah disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku dan kesepakatan antara para pejabat berwenang tentang batas wilayah. Pembuatan peta dengan batasan wilayah indikatif ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap belum tersedianya Peta Kelurahan yang memenuhi kaidah pemetaan di daerah Kelurahan Rajabasa Nunyai. Peta Kelurahan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan potensi kelurahan di masa yang akan datang.

Selain itu, dalam proses penetapan batas wilayah juga dilakukan dengan menggunakan metode pemetaan partisipatif, dimana proses pengambilan data dan informasi di lapangan mengenai batas daerah melibatkan partisipasi aktif dari pihak masyarakat dan perangkat pemerintahan sebagai perencana sekaligus pemberi informasi. Hal ini juga sesuai dengan tujuan lain dari penelitian ini, yaitu memberikan peningkatan pengetahuan kepada masyarakat dan aparatur desa tentang penyebaran teknologi informasi dan pentingnya Peta Kelurahan yang sesuai dengan kaidah pemetaan yang benar.

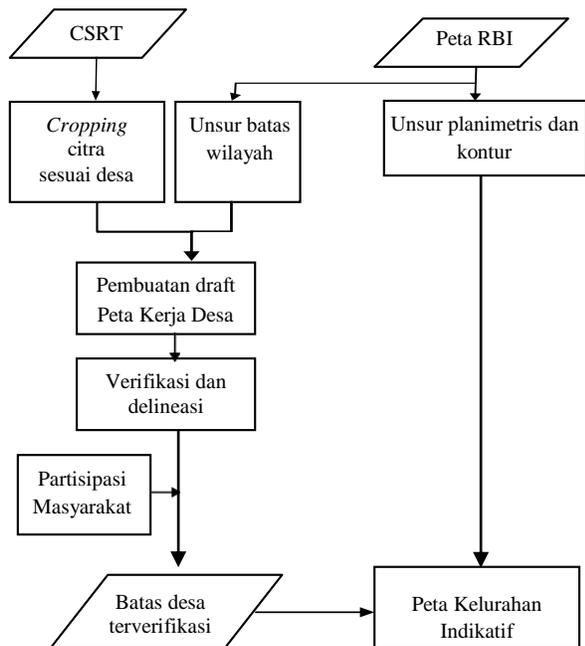
2. Bahan dan Metode

Bahan dalam kegiatan pemetaan kelurahan indikatif ini menggunakan data dasar yang berupa peta Rupabumi Indonesia dan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) di lokasi Kelurahan Rajabasa Nunyai dan sekitarnya. Peta RBI yang digunakan memiliki skala 1:25.000. Peta RBI Skala 1:25.000 memiliki ketelitian horizontal 0,3 mm (BSN, 2010). Kedetailan informasi pada Peta RBI Skala 1:25.000 hingga pada tingkat desa karena sudah terdapat indikasi batas desa dalam salah satu layer Peta RBI tersebut (Hidayat *et al.*, 2016). Batas desa dari peta RBI digunakan sebagai batas indikatif untuk kegiatan validasi batas, selain juga dengan bantuan partisipasi masyarakat dan aparatur kelurahan. Data citra satelit yang digunakan adalah citra Quickbird yang telah di-ortorektifikasi.

Metode pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan kegiatan, meliputi sosialisasi dan penyuluhan materi mengenai peta, diskusi mengenai potensi desa dan pemetaan dengan melibatkan masyarakat dan aparat kelurahan (partisipatif). Pemetaan secara partisipatif digunakan sebagai metode untuk melakukan konfirmasi batas desa dan fasilitas kelurahan.

Tahapan kegiatan pemetaan sendiri dibagi dalam tiga tahap yaitu Tahap Persiapan, Tahap Pengolahan Data, dan Tahap Penyelesaian dan Diseminasi. Tahap persiapan meliputi penjelasan dan sosialisasi kegiatan pengabdian yang dilanjutkan observasi lapangan tahap awal untuk mengetahui kondisi fisik dan sosial budaya wilayah kajian. Sosialisasi sangat penting untuk mendapatkan umpan balik dan menarik partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan penyusunan Peta Kelurahan.

Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data awal terutama data sekunder, seperti data spasial Citra Satelit Resolusi Tinggi, Peta Dasar berupa Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), dan data statistik maupun potensi desa. Data statistik dan potensi desa sebagian besar didapat dari Kantor Kelurahan Rajabasa Nunyai.



Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Peta Kelurahan Indikatif

Ketersediaan data awal ini sangat penting untuk menentukan skema pengumpulan data primer melalui survei lapangan. Tahapan pengolahan data yang pertama dilakukan adalah interpretasi Citra, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan survei lapangan. Pelaksanaan interpretasi Citra dilakukan melalui kaidah sebagai berikut:

- Interpretasi citra secara visual dengan menggunakan dasar interpretasi dan ketentuan pemetaan desa
- Peta Kelurahan tentatif hasil interpretasi visual dibuat dengan isi informasi berupa unsur-unsur dasar Peta Kelurahan
- Cek lapangan (*field check*)
- Uji akurasi
- Penyajian peta akhir

Tahap penyelesaian dan diseminasi hasil kegiatan pengabdian masyarakat pada tahap akhir adalah penyusunan Peta Kelurahan indikatif baik secara digital maupun cetak, sosialisasi dan penyerahan hasil kegiatan penyusunan Peta Kelurahan kepada pemerintah dan masyarakat desa. Penyajian Peta Kelurahan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Kelurahan.

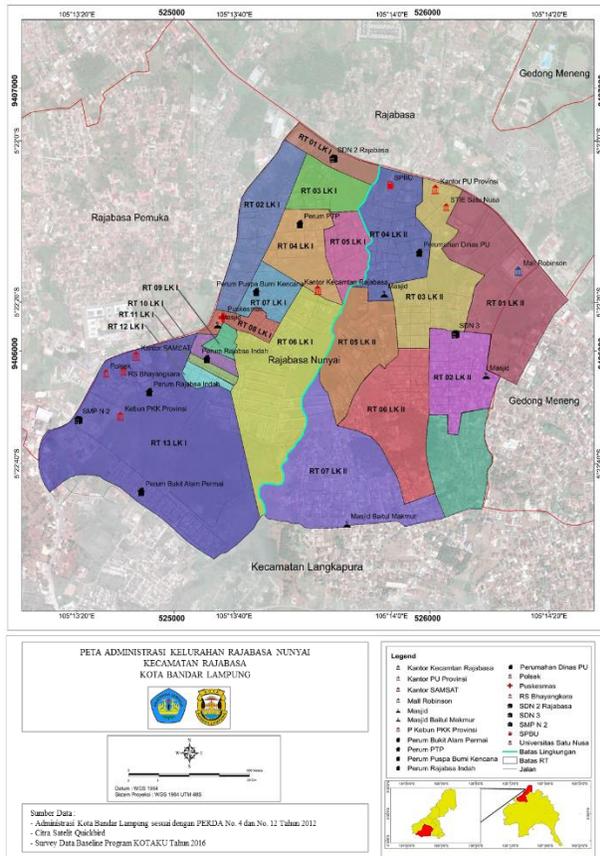
3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan deliniasi batas desa menggunakan acuan awal unsur batas wilayah, yaitu batas desa indikatif yang diambil dari peta RBI. Penggunaan peta RBI adalah untuk memperoleh orientasi posisi Kelurahan Rajabasa Nunyai dengan desa-desa disekitarnya.

Verifikasi batas indikatif dari Peta RBI di atas citra dilakukan dengan cara interpretasi. Interpretasi citra merupakan langkah untuk mengidentifikasi objek dengan cara penafsiran atas objek yang ada pada citra penginderaan jauh. Pada data citra dengan resolusi tinggi unsur interpretasi lebih mudah dikenali sehingga suatu objek dapat diidentifikasi sebagai jalan, sungai, rumah, sawah, dan sebagainya.

Dalam deliniasi dilakukan metode pemetaan partisipatif oleh aparat desa sebagai perwakilan. Perwakilan aparat dan masyarakat dipertemukan dan diarahkan untuk dapat membantu menginterpretasi citra dan mengenali objek-objek yang ada di atas citra kemudian memverifikasi batas yang telah ada. Jika batas RBI tidak sesuai kondisi

yang sebenarnya, garis tersebut diperbaiki dengan cara digambar secara langsung di peta kerja, dan dilakukan perbaikan pada data spasialnya menggunakan perangkat lunak *Geographic Information System (GIS)*.



Gambar 3. Peta Kelurahan Rajabasa Ngunyai

Setelah melalui tahap pengolahan data, akhirnya didapatkan data citra dan peta digital batas administrasi wilayah Kelurahan Rajabasa Ngunyai, ke dua data tersebut di-*overlay*. Hasil dari proses ini adalah peta kerja yang digunakan untuk proses pembuatan Peta Batas Wilayah Kelurahan Rajabasa Ngunyai, seperti dapat dilihat pada **Gambar 3**.

Berdasarkan data administrasi dan pemetaan batas wilayah, Kelurahan Rajabasa Ngunyai memiliki luasan wilayah 125 Ha, yang dibagi dalam 2 Lingkungan (LK) dan 20 Rukun Tetangga (RT). Luas wilayah Lingkungan 1 berdasarkan hasil pemetaan adalah sekitar 60 Ha, dan luas Lingkungan 2 adalah 65 Ha. Adapun batas wilayah berdasarkan administrasi adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Rajabasa

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kemiling dan Kecamatan Langkapura
- Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Rajabasa Pemuka
- Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Gedong Meneng

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini menghasilkan peta batas wilayah indikatif yang diteruskan ke dalam bentuk Peta Kelurahan Rajabasa Ngunyai skala 1:3000. Peta Batas Wilayah Kelurahan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi spasial bagi masyarakat sekitar dan juga sebagai referensi untuk keperluan menunjang rencana pengembangan pembangunan dimasa yang akan datang.

4. Kesimpulan

Pengetahuan perangkat desa dan masyarakat sekitar, serta ketersediaan peta-peta terdahulu menjadi sangat penting dalam menentukan penegasan batas wilayah. Dengan pembuatan Peta Batas Wilayah Kelurahan indikatif ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat dalam bidang penyediaan informasi spasial, dan juga sebagai referensi untuk keperluan menunjang rencana pengembangan pembangunan dimasa yang akan datang.

Dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada pengabdian masyarakat ini juga berhasil meningkatkan kepedulian aparatur desa maupun masyarakat sekitar tentang pentingnya batas wilayah ataupun batas administrasi dalam rangka identifikasi dan mengoptimisasikan potensi daerah yang dimilikinya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Teknik yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini dan kepada LPPM UNILA yang telah mendanai keberlangsungan jurnal ini. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada aparatur kelurahan dan masyarakat Kelurahan Rajabasa Ngunyai atas kerjasamanya dan kesediaan untuk memberikan data dan informasi dalam pengabdian ini.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2019). *Kecamatan Rajabasa Dalam Angka 2018* (64 hal). BPS Kota bandar Lampung: CV Jayawijaya

- Hidayat, F., Rachma, T. R. N., Amhar, F. (2016). Analisis Terhadap Desain Peta untuk Desa Adat (Studi kasus Desa Kanekes/Baduy, Provinsi Banten). *Prosiding FIT-ISI dan CGISE, 2016*
- Pemerintah Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah*. Jakarta: Mendagri
- Badan Informasi Geospasial. (2016). *Peraturan Kepala BIG Nomor 3 tahun 2016 tentang Penyajian Peta Desa, bagian lampiran*. BIG
- Badan Informasi Geospasial. (2016). *Mengawal Desa dengan Informasi Geospasial Tematik*. Jakarta: BIG
- Badan Standarisasi Nasional. (2010). *Spesifikasi penyajian peta rupa bumi – Bagian 2: Skala 1:25.000*. Jakarta: BSN